UJIAN AKHIR SEMESTER II
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Dosen Pengampu:

Assoc. Prof. Dr. Hj. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.

Disusun Oleh:

Ikhsan Rizkia Galih Putra

(NIM 51924125)

DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

COVER.....

DAFTAR ISI..... 1

BAB I SOAL UAS 2

BAB II JAWABAN 2

2.1 Jawaban Soal 1 2

2.1 Jawaban Soal 2 4

2.1 Jawaban Soal 3 6

2.1 Jawaban Soal 4 8

2.1 Jawaban Soal 5 10

BAB I

SOAL UAS

1. Jelaskan menurut Anda apa pentingnya mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi!
2. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dan nilai demokrasi!
3. Sebutkan dan jelaskan Empat (4) landasan Pembangunan nasional!
4. Salah satu bentuk penidikan Kewarganegaraan adalah identitas nasional. Berikan pandangan Anda terkait dengan dinamika dan tantangan identitas nasional di Indonesia, beserta dengan contoh kasusnya!
5. Buatlah Resume Jurnal Kelompok Anda!

BAB II

JAWABAN

2.1 Jawaban Soal 1

Sebelum menuju ke pembahasan utama saya ingin bertanya, kira-kira tujuan kita kuliah itu untuk apa sih? Apakah hanya untuk mendapatkan nilai saja atau gelar S1 atau hal lainnya? Kalau kalian berpikir seperti itu saya pikir kalian itu rugi besar, kenapa? kuliah itu bukan cuma soal nilai dan gelar. Kuliah adalah masa di mana kita ditempa untuk jadi pribadi yang mandiri, kritis, dan siap berkontribusi.

Nah, PKWN ini punya peran penting dalam proses tersebut. Pertama, coba kamu bayangkan masyarakat kita itu adalah sebuah puzzle raksasa. Setiap orang itu punya kepingannya sendiri. PKWN membantu kalian memahami bagaimana kepingan-kepingan itu saling terkait dan membentuk gambaran utuh bangsa Indonesia. Dengan begitu, kalian bisa berperan serta membangun pemahaman masyarakat tentang banyak hal penting. Mari kita bedah satu per satu:

a. Gaya Hidup

Di era digital ini, informasi datang dari mana-mana. Banyak manfaat positif? Tentu, sekaligus dampak negatif. Lalu bagaimana cara agar kita bisa menyaring hal-hal tersebut? PKWN solusinya. Caranya bagaimana? Dalam mata kuliah PWKN kita diberikan wawasan atau edukasi, tujuannya apa? agar kita dapat menyaring dan memilih gaya hidup yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dan tidak melenceng.

b. Nasionalisme

Cinta tanah air itu bukan hanya mengenai kibar bendera sang merah putih, Nasionalisme di perguruan tinggi artinya kita diajak untuk memahami sejarah bangsa, menghargai keberagaman, dan

punya semangat untuk memajukan Indonesia. Kita ialah sebuah pilar yang bisa menularkan rasa bangga dan cinta pada negara kepada lingkungan sekitar. Hal itu terwujud jika kita tidak hanya paham tapi bertindak secara nyata akan Nasionalisme.

c. Peduli Masa Depan

Masa depan bangsa ada di tangan kita. PKWN mendorong kita untuk peduli terhadap masa depan. Artinya apa? kita tidak boleh apatis, dan harus aktif mencari solusi untuk berbagai permasalahan bangsa, mulai dari isu lingkungan, ekonomi, sampai sosial.

d. Kesehatan Mental Bangsa

Ini isu yang makin relevan di zaman sekarang. Dikutip dari biofarma.co.id "Di Indonesia, survei I-NAMHS (2022) mencatat bahwa 34,8% remaja mengalami masalah kesehatan mental. Sayangnya, stigma masih menghambat banyak remaja untuk mencari bantuan." dan h masih berlanjut hingga saat ini. Hal ini membuktikan bahwa pengarus Kesehatan mental bangsa dalam suatu negara itu tidak bisa kita remehkan.

e. Penegakan Hukum

Negara yang kuat adalah negara yang menjunjung tinggi hukum. Dalam PKWN kita diajarkan tentang pentingnya penegakan hukum. Kita akan belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta memahami bagaimana sistem hukum bekerja. Dengan pemahaman ini, kita bisa menjadi warga negara yang patuh hukum dan kritis terhadap praktik penegakan hukum yang tidak adil.

f. Pentingnya Kesadaran terhadap Ideologi Pancasila

Terakhir, dan ini sangat fundamental: Pancasila adalah dasar negara kita. PKWN ada untuk menguatkan kesadaran kita terhadap ideologi Pancasila. Kita akan diajak untuk dapat memahami nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya dan bagaimana Pancasila menjadi pemersatu bangsa di tengah keberagaman. Dengan pemahaman yang kuat, kita bisa menjadi benteng penjaga Pancasila dari berbagai ancaman ideologi lain.

2.1 Jawaban Soal 2

Prinsip-prinsip nilai demokrasi itu ada dua, yaitu: *Freedom* (Kebebasan) / *Equality* (Kesetaraan), *people's sovereignty* (Kedaulatan Rakyat).

Freedom (Kebebasan)

Bayangkan ini seperti kalian memiliki ruang gerak yang luas untuk berekspresi, berpendapat, memilih, dan bertindak tanpa tekanan atau ancaman dari pihak manapun, selama tidak melanggar hak orang lain dan aturan yang berlaku.

- **Kebebasan Berpendapat:** Kalian bebas menyampaikan ide, kritik, atau saran, baik lisan maupun tulisan (misalnya di media sosial, forum diskusi, atau mimbar umum). Tentu ada batasannya, seperti tidak boleh menyebarkan fitnah atau ujaran kebencian.
- **Kebebasan Berkumpul dan Berserikat:** Kalian bebas bergabung dengan organisasi mahasiswa, komunitas hobi, atau membentuk perkumpulan dengan tujuan yang sah.
- **Kebebasan Beragama:** Kalian bebas memilih keyakinan agama masing-masing dan menjalankan ibadahnya tanpa paksaan.
- **Kebebasan Memilih:** Kalian bebas menentukan pilihan politik dalam pemilihan umum, tanpa intimidasi atau tekanan.

Equality (Kesetaraan)

Ini berarti bahwa di mata hukum dan dalam hak-hak dasar, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama, tanpa memandang suku, agama, ras, jenis kelamin, latar belakang sosial, atau kekayaan.

- **Kesetaraan di Hadapan Hukum:** Jika ada dua orang melakukan pelanggaran yang sama, mereka harus menerima sanksi yang sama pula, tidak peduli siapa mereka. Tidak ada yang "lebih kebal hukum" atau "lebih istimewa" karena jabatannya atau kekayaannya.
- **Kesetaraan Hak Politik:** Setiap warga negara dewasa memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum (satu orang, satu suara).
- **Kesetaraan Kesempatan:** Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, atau pelayanan publik, tanpa diskriminasi.

People's Sovereignty (Kedaulatan Rakyat)

Secara sederhana, **kedaulatan rakyat** berarti kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Rakyatlah yang berhak menentukan bagaimana negara mereka akan diatur dan siapa yang akan memimpin.

- **Rakyat Memegang Kekuasaan:** Dalam demokrasi, kekuasaan tidak dipegang oleh raja, diktator, atau sekelompok elit tertentu, melainkan oleh rakyat itu sendiri. Rakyat adalah "pemilik" sah negara ini.
- **Melalui Pemilu:** Bagaimana rakyat menjalankan kedaulatannya? Melalui pemilihan umum (pemilu). Rakyat memilih wakil-wakilnya (anggota DPR, presiden, kepala daerah) untuk duduk di pemerintahan dan menyuarakan aspirasi mereka.
- **Wakil Rakyat adalah Pelayan Rakyat:** Para pemimpin yang terpilih itu sejatinya adalah pelayan rakyat. Mereka bertugas melaksanakan kehendak rakyat, membuat kebijakan yang pro-rakyat, dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan mereka kepada rakyat.
- **Kontrol Rakyat:** Rakyat juga punya hak untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Ini bisa dilakukan melalui kritik, demonstrasi damai, pengawasan media massa, atau melalui wakil-wakil mereka di parlemen.

Nilai Demokrasi

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman.
6. Menjamin tegaknya keadilan.

2.1 Jawaban Soal 3

Empat (4) landasan Pembangunan nasional yaitu:

1. Landasan Konstitusional
2. Landasan Idiil
3. Landasan Operasional
4. Landasan Visional

1. Landasan Konstitusional

   Landasan Konstitusional adalah dasar hukum tertinggi yang mengatur pembangunan nasional. Bayangkan ini sebagai cetak biru atau undang-undang dasar yang menjadi acuan utama. Di Indonesia, landasan konstitusional ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

   Mengapa penting? Karena UUD NRI 1945 berisi tujuan negara, bentuk negara, sistem pemerintahan, serta hak dan kewajiban warga negara. Semua program dan kebijakan pembangunan harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan apa yang tertulis dalam konstitusi. Misalnya, pembangunan ekonomi harus sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan kemakmuran rakyat. Pembangunan pendidikan harus mengacu pada Pasal 31 UUD 1945 tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan.

2. Landasan Idiil

   Landasan Idiil adalah dasar filosofis atau pandangan hidup bangsa yang menjadi arah dan tujuan pembangunan. Ini adalah nilai-nilai luhur yang diyakini dan dianut oleh seluruh rakyat. Bagi Indonesia, landasan idiilnya adalah Pancasila.

   Mengapa penting? Pancasila dengan lima silanya (Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) memberikan arah moral dan etika bagi pembangunan. Pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan materi, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai spiritual, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Misalnya, pembangunan infrastruktur tidak boleh merusak lingkungan atau mengorbankan hak-hak masyarakat adat, karena itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan.

3. Landasan Operasional

Landasan Operasional adalah aturan-aturan teknis dan kebijakan konkret yang dijabarkan dari landasan konstitusional dan idiil untuk menjalankan pembangunan. Ini seperti panduan praktis yang digunakan pemerintah dan semua pihak terkait dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan.

Mengapa penting? Landasan operasional ini bisa berupa Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), atau dokumen perencanaan lainnya. Contohnya, untuk mencapai tujuan pembangunan yang ada di UUD dan sejalan dengan Pancasila, pemerintah menyusun RPJMN yang berisi target-target pembangunan lima tahunan di berbagai sektor (ekonomi, pendidikan, kesehatan, dll.). Ini adalah detail bagaimana pembangunan akan dijalankan.

4. Landasan Visonal

Landasan Visonal adalah gambaran masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan nasional. Ini adalah cita-cita atau impian besar tentang seperti apa Indonesia di masa depan. Ini sifatnya lebih ke arah inspirasi dan motivasi jangka panjang.

Mengapa penting? Landasan visional memberikan arah jangka panjang dan semangat bagi seluruh elemen bangsa untuk bekerja sama. Misalnya, Indonesia memiliki visi "Indonesia Emas 2045" yang membayangkan Indonesia menjadi negara maju, adil, makmur, dan berdaulat pada peringatan 100 tahun kemerdekaan. Visi ini menjadi pemersatu langkah dan tujuan berbagai pihak, dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat, untuk mencapai cita-cita tersebut. Ini memotivasi kita untuk terus berinovasi dan bekerja keras demi masa depan yang lebih baik.

Singkatnya:

- Konstitusional: Dasar hukum tertinggi (UUD 1945).
- Idiil: Dasar nilai dan filosofi (Pancasila).
- Operasional: Aturan dan rencana pelaksanaan (UU, PP, RPJMN).
- Visonal: Cita-cita dan impian masa depan (misalnya, Indonesia Emas 2045).

2.1 Jawaban Soal 4

Menurut saya mengenai identitas nasional di Indonesia selalu berubah, dipengaruhi oleh pluralisme, globalisasi, dan perkembangan teknologi informasi dengan sangat cepat. Tantangannya meliputi intoleransi, radikalisme, ketimpangan sosial, krisis multikulturalisme, lunturnya nilai Pancasila, serta pengaruh ideologi transnasional. Contoh kasusnya terlihat pada polarisasi pilkada, konflik antar kelompok, maraknya hoaks, ancama radikalisme, hingga klaim budaya oleh negara lain.

"Partai politik sebagai wadah aspirasi masyarakat melaksanakan fungsi-fungsi partai politik salah satunya adalah komunikasi politik. Partai Demokrat sebagai salah satu partai politik yang ada di Indonesia melaksanakan fungsi komunikasi politik. Namun dalam pelaksanaannya komunikasi politik di Partai Demokrat mengalami hambatan salah satunya miskomunikasi. Hal ini disebabkan tingkat pendidikan dan kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah karena anggota partai sebagai komunikan harus mampu memahami dan mengerti benar apa yang disampaikan oleh pimpinan sebagai komunikator."(Dewi Kurniasih, 2013).

Rincian contoh kasus:

1. **Kasus Polarisasi Pilkada dan Pemilu:** Dalam beberapa pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, terutama di tingkat lokal, isu suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Ini menciptakan polarisasi di masyarakat yang mengancam persatuan dan kohesi sosial, serta mengikis nilai-nilai toleransi yang menjadi bagian dari identitas nasional. Contoh paling nyata adalah pilkada DKI Jakarta 2017 yang sangat sarat dengan isu SARA.
2. **Kasus Konflik Antar Kelompok/Daerah:** Meskipun tidak sesering dulu, masih ada beberapa kasus konflik antar kelompok atau daerah yang dipicu oleh isu sensitif, seperti batas wilayah, sumber daya alam, atau bahkan kesalahpahaman budaya. Konflik seperti ini menunjukkan bahwa identitas lokal terkadang masih lebih kuat daripada identitas nasional dalam situasi tertentu, dan dibutuhkan upaya untuk memperkuat ikatan kebangsaan.
3. **Penyebaran Hoaks dan Ujaran Kebencian di Media Sosial:** Hoaks dan ujaran kebencian yang marak di media sosial

seringkali menargetkan kelompok tertentu (etnis, agama, atau politik) dan bertujuan untuk memecah belah. Hal ini secara langsung menyerang semangat persatuan dan nilai-nilai gotong royong yang menjadi ciri khas identitas nasional Indonesia.

4. **Radikalisme dan Terorisme:** Kelompok-kelompok radikal dan teroris yang mengklaim diri berjuang atas nama agama namun melakukan kekerasan dan menolak Pancasila serta NKRI, jelas merupakan ancaman fundamental terhadap identitas nasional. Mereka berupaya mengganti ideologi negara dengan ideologi transnasional yang tidak sesuai dengan konteks Indonesia. Contohnya adalah kasus-kasus terorisme yang dilakukan oleh Jemaah Islamiyah atau kelompok-kelompok serupa.

5. **Klaim Budaya oleh Negara Lain:** Beberapa kasus klaim budaya oleh negara lain (misalnya, klaim reog, batik, atau lagu daerah) sempat menimbulkan gejolak dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian dan pengakuan identitas budaya Indonesia di mata dunia. Meskipun bukan ancaman internal, ini memicu refleksi tentang seberapa kuat identitas budaya kita sebagai bagian dari identitas nasional.

2.1 Jawaban Soal 5

Judul Jurnal:
Refleksi Kasus Bunuh Diri Tenaga Medis Dan Kurangnya Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Warga Negara.

Nama Anggota Kelompok:

- Salsya Nadia Putri (51924148)
- Muhammad Fajar Satria Tama (51924133)
- Ikhsan Rizkia Galih Putra (51924125)
- Reiza Ananda Putra (51924141)
- Dalla Ruci pukayama (51924136)
- Assoc. Prof. Dr. Hj. Dewi Kurniasih, S.IP., M.Si

Pendahuluan:
Perundungan atau *bullying* adalah masalah yang sering dibahas dan biasanya terjadi di kalangan anak-anak dan remaja di sekolah. Namun, bullying juga terjadi di perguruan tinggi, meskipun sering kali diabaikan. Baru-baru ini, terjadi kasus perundungan yang dialami mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), dokter Aulia Risma Lestari.

Tinjauan Pustaka:

Dalam jurnal ini, tinjauan pustaka yang digunakan adalah teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian, selain itu kajian pustaka juga melalui jurnal jurnal yang berkaitan dengan problematika permasalahan.

1. Studi kasus dalam Tragedi

   Hasil pembahasan yang dijadikan sebagai kajian pustaka dalam jurnal ini adalah studi kasus dalam tragedi atau kronologi kejadian yang ditulis oleh Ahdiat, A. (2024) dengan judul artikel "Mahasiswa Kedokteran Bunuh Diri, Apa Pemicunya?".

   Dalam artikel tersebut kronologi peristiwa dimulai dari penemuan jenazah dr. Aulia Risma Lestari, temuan awal dan dugaan penyebab kematian, respon keluarga, hingga catatan harian dan pesan suaru yang menjadi butki kuat dalam kasus pembahasan dalam jurnal ini.
2. Analisis Sila ke-2 dan Sila ke-5

   Artikel lain yang kami cantumkan dalam tinjauan Pustaka ini ditulis oleh Heti Novita Sari, dkk (2022) yang berjudul "Perulaku Bullying Yang Menyimpang Dari Nilai Pancasila Pada Siswa Sekolah". Dalam artikel ini beberapa informasi mengenai analisis yang berkaitan dengan kasus yang menjadi pembahasan jurnal dan

kami masukkan kedalam jurnal dengan perubahan yang telah diselaraskan.

Isi dari artikel yang diambil antara lain yang pertama ialah analisis sila ke-2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradap yang menyatakan prinsip menekankan pengakuan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia atau hak asasi manusia (HAM), yang kedua ialah analisis sila ke-5 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang menyatakan prinsip berfokus pada perwujudan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Kesimpulan & Saran:

Analisis terhadap kasus tragis dr. Aulia Risma Lestari dan data pendukung lainnya secara gamblang menunjukkan adanya permasalahan serius dan sistemik dalam lingkungan pendidikan kedokteran di Indonesia. Kasus dr. Aulia bukanlah anomali, melainkan representasi ekstrem dari budaya perundungan yang mengakar, mencakup eksploitasi finansial, beban kerja yang tidak manusiawi, dan penyalahgunaan psikologis. Budaya toksik ini tumbuh subur dalam struktur hierarki yang kaku, lemahnya pengawasan, dan normalisasi praktik-praktik abusif sebagai bagian dari "kurikulum tersembunyi".

Daftar pustaka:

- Ahdiat, A. (2024, Agustus 15). Mahasiswa Kedokteran Bunuh Diri, Apa Pemicunya?
- Arif Rahman Nurdianto, F. R. (2023). Bullying Pada Mahasiswa Pendidikan Kedokteran Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Ham.
- Assoc. Prof. Dr. Hj. Dewi Kurniasih, S. M. (t.thn.). PANCASILA SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN ILMU, 23.
- Bisnis.com. (2024, Desember 27). Buntut Panjang Kasus Bullying Dokter Aulia Risma.
- Emedia.com. (2024, Agustus 31). Kasus Dokter Aulia Risma Bagai Puncak Gunung Es Gelapnya Perundungan di Dunia Pendidikan Kedokteran.
- Fathinah, N. H. (2023, April 28). Implementasi Pendidikan Pancasila Dalam Pencegahan Perundungan Secara Verbal di Lingkungan Sekolah.
- Heti Novita Sari, P. P. (2022). Perilaku Bullying Yang Menyimpang Dari Nilai Pancasila Pada Siswa Sekolah. 8.
- Jenderal Achmad Yani University. (2025). Exploring The Perception and Potential of Bullying among First Year Medical Students In Indonesia: A Qualitative Study.

- metrotvnews.com. (2025, Mei 1). Tersangka Bullying Dokter Aulia Risma Batal Lulus Cepat.
- perpustakaan.dpr.go.id. (2024, September 1). Permasalahan bullying pada lingkaran PPDS ini menjadi masalah yang tidak mudah untuk diberantas. Kemenkes, mengatakan intimidasi dari senior dan dosen ke junior membuat para korban perundungan takut melapor. - Perpustakaan DPR RI.